



# RENCANA KERJA

TAHUN 2024

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024. Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 merupakan tahapan kelima dari 6 (enam) tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan berpedoman kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sedangkan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami sadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik berkenaan dengan substansi maupun penyajian dokumen ini. Saran dan masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadikan dokumen rancangan akhir Renja BKPSDMD lebih baik.

Pangkalpinang, April 2023

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dra. SUSANTI, M.AP.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650713 199203 2 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
 <b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	 <b>I-1</b>
1.1    Latar Belakang .....	I-1
1.2    Landasan Hukum.....	I-5
1.3    Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4    Sistematika Penulisan.....	I-8
 <b>BAB II     HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....</b>	 <b>II-1</b>
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	II-1
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD.....	II-24
2.3    Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD.....	II-33
2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-36
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-42
 <b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN BKPSDMD.....</b>	 <b>III-1</b>
3.1    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2    Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDMD.....	III-3
3.3    Program dan Kegiatan.....	III-5
 <b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....</b>	 <b>IV-1</b>
4.1    Rencana Kerja .....	IV-1
4.2    Pendanaan.....	IV-3
 <b>BAB V     PENUTUP.....</b>	 <b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDMD dan Pencapaian Renstra BKPSDMD s.d. Tahun 2021 (Tahun Berjalan).....	II-2
Tabel 2.2	Jumlah ASN BKPSDMD Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin pertanggal 31 Desember 2021.....	II-26
Tabel 2.3	Jumlah ASN BKPSDMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan pertanggal 31 Desember 2021.....	II-27
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama BKPSDMD.....	II-27
Tabel 2.5	Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama BKPSDMD.....	II-28
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome).....	II-30
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Prov. Kep. Bangka Belitung.....	II-32
Tabel 2.8	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Prov. Kep. Bangka Belitung.....	II-37
Tabel 2.9	Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Prov. Kep. Bangka Belitung.....	II-43
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi Misi RPJMD dan Tujuan Sasaran BKPSDMD Beserta Target Pada Renja Tahun 2023.....	III-5
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	III-8
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan BKPSDMD Tahun 2023.....	IV-4

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA PD.....	I-3
Gambar 1.2	Bagan Alir Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	I-4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-25

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana uraian tugasnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023–2026. Renstra PD selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang disusun dengan berpedoman pada Renstra BKPSDMD 2023-2026, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan merupakan cakupan dari Rancangan Awal Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

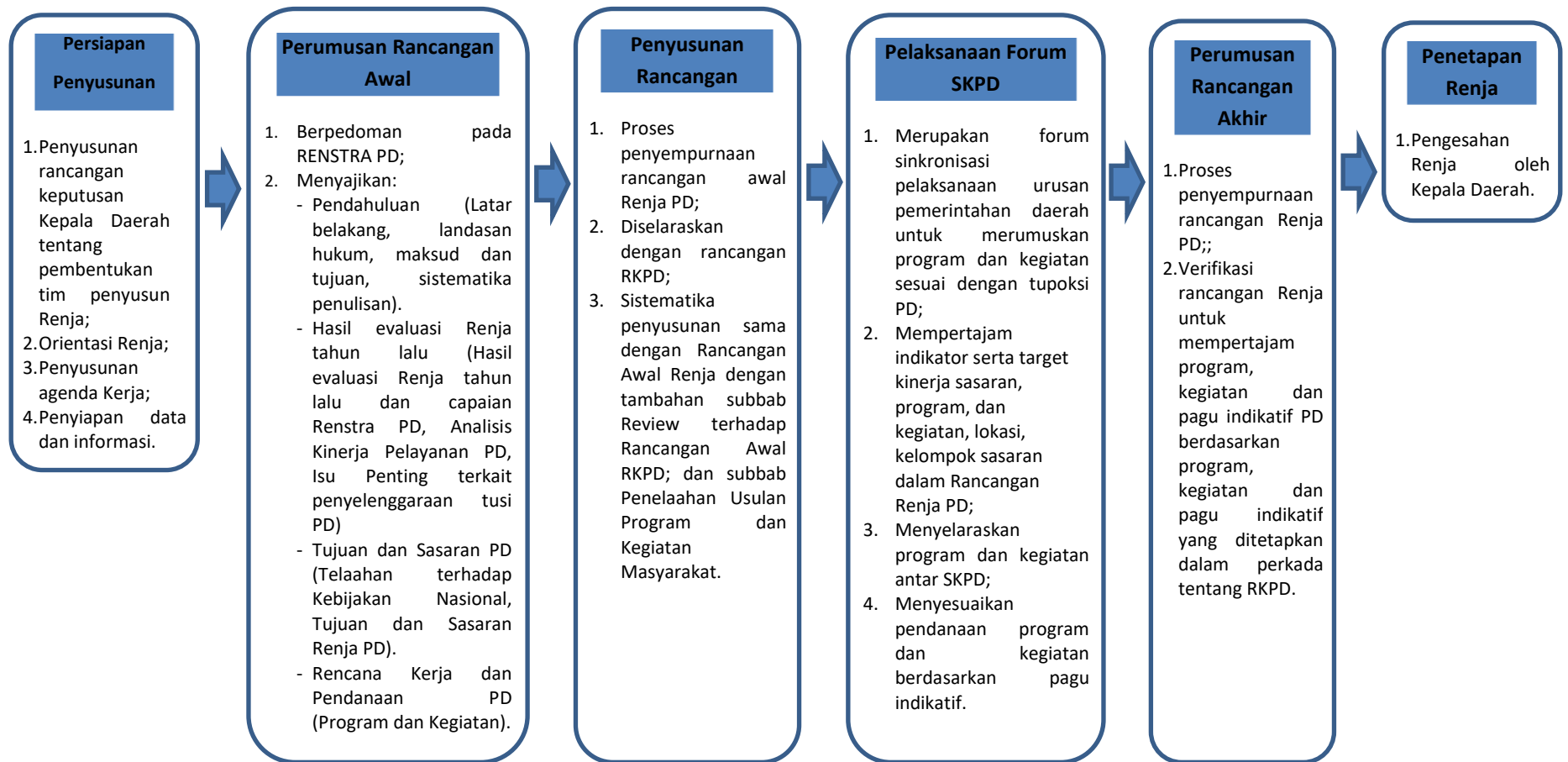
Proses penyusunan Rancangan Awal Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dengan persiapan penyusunan Renja BKPSDMD yang meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja BKPSDMD;
2. Orientasi mengenai Rencana Kerja BKPSMD;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja BKPSDMD; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Pemverifikasian oleh Bappeda dan penetapan oleh Peraturan Gubernur terhadap Renja BKPSDMD menjadi pedoman dalam menyusun RKA BKPSDMD pada Tahun Anggaran 2024. Berikut ini disajikan bagan tahapan penyusunan Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

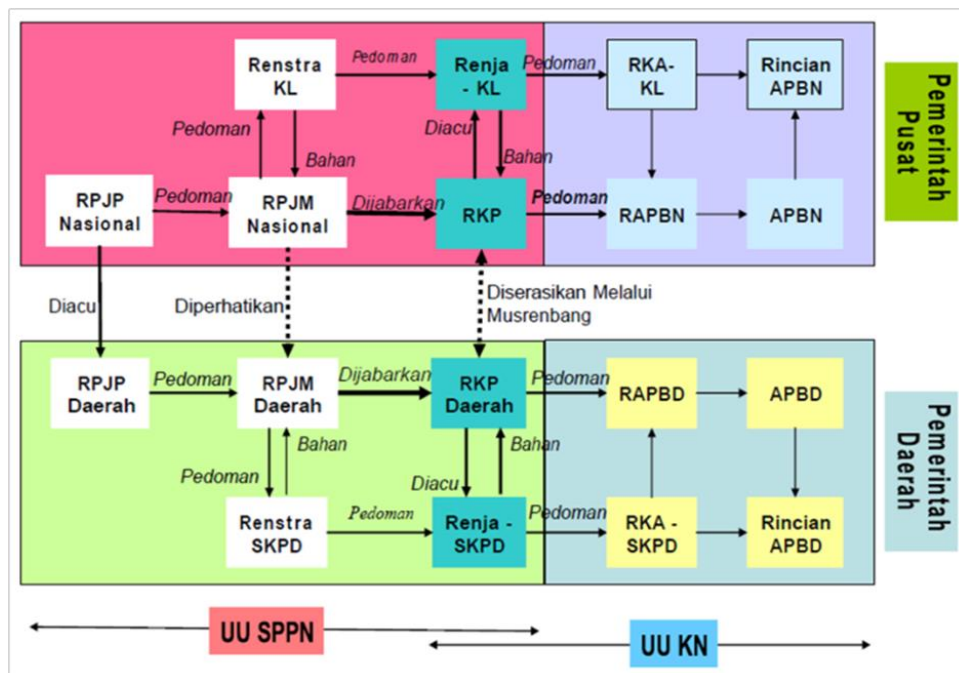


Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan dan sasaran kepala perangkat daerah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan perangkat daerah;
2. memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja Rencana Strategis perangkat daerah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah hingga tahun berkenaan.

Gambar 1.2.

Bagan Alir Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan

- Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 5 Seri D);
  17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
  18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor .... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor..... Seri....)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai upaya menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. untuk menjabarkan Renstra BKPSDMD Tahun 2023-2026 ke dalam dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
2. untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu sekaligus memperkirakan realisasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan.
3. mewujudkan Anggaran Berbasis Kinerja.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Penyusunan Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 mengacu pada sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

**BAB I      Pendahuluan.**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Didalamnya memuat subbab tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II     Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.**

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

**BAB III    Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.**

Bab ini berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan tahun 2024.

**BAB IV    Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Bab ini berisikan rencana kerja dan pendanaan untuk tahun 2024.

**BAB V     Penutup.**

Bab ini berisikan catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU



#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian kinerja Renstra OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sesuai Renstra OPD, serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tingkat capaian kinerja dari BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dapat diketahui tentunya dengan melakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022, berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan yaitu 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan.

Total realisasi secara keseluruhan Belanja BKPSDMD tahun anggaran 2022 yakni 96,44% dengan realiasi fisik sebesar 100%. Adapun capaian realisasi kinerja (capaian *outcome* program dan *output* kegiatan) pada angka 96,44% berarti realisasi kinerja di antara interval  $91 \leq 100\%$  yang merupakan kriteria penilaian kinerja "**SANGAT TINGGI**".

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2022 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDMD dan  
Pencapaian Renstra BKPSDMD s.d. Tahun 2022 (tahun berjalan)\*  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
							Target Renja SKPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
5 03				URUSAN KEPEGAWAIAN								
5 03 01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	85	81,75	85	83	98%		
5 03 01	1.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD (Dokumen)	9	10	9	9	100%	7	
5 03 01	1.01	01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2	2	100%	2	
5 03 01	1.01	02		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	1	
5 03 01	1.01	07		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD (DALEV, LAKIP, LPPD dan ATA) (Dokumen)	7	7	7	7	100%	4	
				Survey kepuasan pelayanan internal (BKPSDM)			98	90	92%			
5 03 01	1.02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan PD tepat waktu	3		3	3	100%		
5 03 01	1.02	01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97		97	100	103%	101	
5 03 01	1.03			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum PD	8		5	5	100%		
5 03 01	1.03	01		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Tersedia	35		35	35	100%	30	
5 03 01	1.03	04		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	7		7	7	100%	7	
5 03 01	1.03	05		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	20		20	20	100%	20	
5 03 01	1.03	06		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	3	

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
5	03				URUSAN KEPEGAWAIAN									
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	85	81,75	85	83	98%			
5	03	01	1.03	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis ATK yang Dibeli	2		5	5	100%			
						Jumlah Jenis Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	5		2	2	100%			
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	-	-	-	5		
5	03	01	1.03	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang Tersedia	100		118	287	243%			
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	12		
5	03	01	1.03	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	36		103	24	23%	12		
						Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilaksanakan	36		16	35	219%			
						Jumlah Makan dan Minum Rapat Yang Tersedia	1500		1100	2657	242%			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	12		
5	03	01	1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5	03	01	1.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	101		
5	03	01	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-			
5	03	01	1.07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1		
5	03	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4		98	90	92%	3		
5	03	01	1.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	2		550	550	100%			
						Jumlah Surat/Barang Yang Dikirim	3000		2	2	100%			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	12		

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
5 03	URUSAN KEPEGAWAIAN												
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Nilai SAKIP PD	85	81,75	85	83	98%			
5 03 01	1.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/Fax, TV Kabel, Virtual Meeting Yang Dibayarkan	12		12	12	100%			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-		12		
5 03 01	1.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Kontrak Yang Dipekerjakan	81		78	78	100%			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12		
5 03 01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Survey kepuasan pelayanan internal (BKPSDM)	3		98	90	92%			
5 03 01	1.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	7		7	7	100%	7		
5 03 01	1.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	3		3	3	100%	3		
5 03 01	1.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	2		2	2	100%			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	121		

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
							Target Renja SKPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
5 03				URUSAN KEPEGAWAIAN								
5 03 02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan, informasi dan peningkatan kapasitas pegawai		98	111,13	113%			
5 03 02 1.01				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pegawai yang terpenuhi sesuai formasi		176	191	109%			
5 03 02 1.01 02				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Formasi ASN	1	1	1	100%	1		
5 03 02 1.01 03				Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN/IPDN yang Lulus Seleksi	139	139	18	13%	100		
5 03 02 1.01 06				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiun, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun	97	97	122	126%	112		
				Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi			1	1	100%			
				Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		-	-	-	-	1		
5 03 02 1.01 08				Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Pemberian Bantuan Hukum/LKBH KORPRI	10	1	1	100%			
				Jumlah perlombaan dalam rangka HUT KORPRI		1	1	1	100%			
				Jumlah peserta kontingen mengikuti MTQ Tk. Nasional		26	20	16	80%			
				Jumlah data dan informasi kepegawaian yang akurat			1	1	100%			
5 03 02 1.01 10				Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Yang Dikelola	1	1	1	100%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	-	-	-	1		
5 03 02 1.01 11				Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pegawai Yang Dikelola Datanya	1185	1783	2703	152%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		-	-	-	-	1		
5 03 02 1.03				Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pegawai Tugas Belajar yang Menerima Beasiswa (Orang)	1444	325	325	100%	1310		
5 03 02 1.03 02				Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang Diassesment	0	1175	1213	103%			
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		-	-	-	-	1		
5 03 02 1.03 03				Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	-	-	-	-	1		

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
5 03	URUSAN KEPEGAWAIAN												
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan, informasi dan peningkatan kapasitas pegawai			98	111,13	113%			
5 03 02 1.03 04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				Jumlah ASN yang menerima Beasiswa	11		350	298	85%			
5 03 02 1.03 04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	-	-	-	-	-	1		
5 03 02 1.03 13	Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	-	-	-	-	-	500		
					Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi dan kepangkatan			93	96,13				
5 03 02 1.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				Jumlah ASN yang di promosi dan Mutasi	325		11	11	100%			
5 03 02 1.02 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN				Jumlah ASN Yang Ditempatkan Sesuai Kompetensi	200		1444	1482	103%	330		
5 03 02 1.02 02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				Jumlah ASN yang Diterbitkan SK Kenaikan Pangkat	1175		9	11	122%	1180		
5 03 02 1.02 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.				Jumlah ASN yang Dipetakan Kompetensinya	350		325	325	100%	330		
					Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin minimal baik			99,82	99,88				
5 03 02 1.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Jumlah ASN yang diukur nilai indeks profesionalitasnya	4215		5469	5890	108%			
5 03 02 1.04 02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Jumlah ASN yang Diukur Nilai Indeks Profesionalitasnya	5469		5469	5890	108%	1		
5 03 02 1.04 02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	-	-	1		
5 03 02 1.04 04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				Jumlah penerbitan selaya rencana	500		500	534	107%			
5 03 02 1.04 04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-	-	-	-	-	3		
5 03 02 1.04 05	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai				Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	-	-	-	-	-	600		
5 03 02 1.04 07	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN				Jumlah ASN yang Dibina Disiplinnya	3700		3700	4055	110%	2000		
5 03 02 1.04 08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani	8		8	7	88%			
5 03 02 1.04 08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-	-	-	-	-	7		

Kode				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
5	04			URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya (BKPSDMD)			83	84,89	102%			
5	04	02	1.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang meningkat kompetensi teknis	18%^		18,47	32,73	177%			
5	04	02	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	-	-	-	-	-	10		
5	04	02	1.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	1000	1000	1763	176%	3152		
5	04	02	1.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Nilai akreditasi diklat	81		81,2	86,33	106%			
5	04	02	1.02	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Dokumen Mutu Pengembangan Kompetensi	6	6	6	100%			
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Movev Pengembangan Kompetensi Teknis	10	10	10	100%			
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	-	-	-	-		10		
					Persentase ASN yang meningkat kompetensi manajerial dan fungsional	17,37%		17,37	31,15	179%			
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Prajabatan	188	80	359	449%			
					Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			30	41	137%			
					Jumlah Pimpinan Daerah yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			80	0	0%			

Indikator suatu kegiatan dapat terdiri dari beberapa indikator kinerja, dimana target-target indikator kinerja dalam sebuah kegiatan realisasi capaiannya dapat terpenuhi, atau melebihi target, ataupun tidak tercapai. Berikut uraian hasil analisis evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. diatas.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 86, realisasi 83
- Survey kepuasan pelayanan internal dengan target 98%, realisasi 90%.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2022, sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran BKPSDMD, dimana realisasi kinerja program/kegiatan/subkegiatan BKPSDMD pada tahun 2022 mencapai 100%, artinya program/kegiatan/subkegiatan terlaksana dengan baik dan memenuhi target yang ditetapkan.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun program/kegiatan dengan tingkat realisasi yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Kepegawaian Daerah

1. Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan, informasi dan peningkatan kapasitas pegawai dengan target 98% dan realisasi 111,13%

2. Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi dan kepangkatan dengan target 93% dan realisasi 96,13%
3. Persentase ASN yang prestasi dan perilaku kerja berkategori baik dengan target 99,82% dan realisasi 99,88%

B. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Persentase ASN yang meningkat kompetensinya dengan target 83%, realisasi 84,89%

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Secara spesifik beberapa faktor penghambat dan pendorong yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

Realisasi kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 pada sasaran Meningkatnya Kompetensi Aparatur Terhadap Jabatan dengan indikator Persentase ASN Yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan dari target .....% terealisasi .....%. Capaian ini sudah melampaui target yang telah ditetapkan dan mengalami kemajuan .....% apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar .....%. Walaupun mengalami peningkatan capaian namun kondisi tidak mandirinya lembaga kediklatan yang masih bergabung dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretariat KORPRI menyebabkan upaya peningkatan kompetensi ASN tidak maksimal karena alokasi anggaran terbagi menjadi 3 urusan, yaitu kepegawaian, kediklatan, dan sekretariat KORPRI.

B. Faktor Pendorong

- Realisasi capaian sasaran Meningkatnya Kompetensi Aparatur Terhadap Jabatan dengan indikator Persentase ASN Yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan sudah terealisasi mencapai target dengan tingkat capaiannya .....% dapat dikategorikan sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dengan meningkatnya kesadaran pegawai akan hak

mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi minimal 20 JP per tahun dan dapat dilaksanakan secara daring/webinar.

- Realisasi kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 pada sasaran Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN dengan indikator Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori minimal baik dari target 99,82% terealisasi 99,88%. Realisasi telah mencapai target yang ditetapkan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kemajuan sebesar 0,06%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bila dibandingkan dengan tahun lalu sedikit naik. Hal ini disebabkan karena meningkatnya disiplin PNS dengan diberlakukannya absensi pemindaian baik sidik jari maupun wajah serta penilaian kinerja berbasis aplikasi.

#### 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BKPSDMD.

Implikasi yang ditimbulkan dengan tidak tercapainya target pada beberapa program/kegiatan secara umum menyebabkan sisa anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BKPSDMD Tahun Anggaran 2022 namun tidak terlalu signifikan untuk seluruh program pada belanja langsung. Ini terbaca pada laporan realisasi keuangan triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dimana realisasi keuangan BKPSDMD sebesar 96,44% dan SILPA sebesar 3,56%.

Lebih khusus, implikasi terhadap capaian kinerja program/kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Implikasi tidak tercapainya target kinerja program.
  - 1. Perencanaan kurang optimal.
  - 2. Anggaran tidak digunakan dengan optimal.
- b. Implikasi tercapainya target kinerja program
  - 1. Perencanaan tepat sasaran.

2. Anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Jabatan struktural dapat terisi sesuai SOTK/kebutuhan.
  4. Kinerja meningkat.
  5. Terselenggaranya peningkatan kompetensi teknis dan fungsional bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  6. Terselenggaranya pendidikan formal PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik penerima beasiswa APBD maupun beasiswa K/L/Sponsor.
  7. Terselenggaranya pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, promosi dan mutasi pegawai.
- c. Implikasi capaian kinerja program melebihi target.
1. Terdapat PNS yang telah mengikuti Diklatpim namun belum menduduki jabatan.
  2. Lebih banyak jumlah PNS yang mendapatkan hak diklat 20 jpl/tahun.
  3. Kinerja meningkat.
  4. Pemenuhan sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.
  5. Terselenggaranya pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, promosi dan mutasi pegawai.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 kegiatan yang melebihi target justru lebih banyak daripada kegiatan yang tidak memenuhi target. Sebagaimana uraian diatas dapat diketahui bahwa penyebab tidak tercapainya target kegiatan di luar kendali organisasi BKPSDMD. Sehingga BKPSDMD akan semakin memperkuat koordinasi dan konsultasi terkait perkembangan kebijakan baik dari pusat maupun kepala daerah. Adapun kegiatan-kegiatan yang

capaiannya melebihi target dipandang perlu mendapat perhatian sehingga dalam perencanaan di masa yang akan datang dapat ditetapkan target yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Penyesuaian perlu dilakukan untuk meminimalkan kesenjangan antara target kinerja dan realisasi capaian kinerja program/kegiatan.

Lebih jelas, kebijakan/tindakan yang akan diambil sebagai berikut:

- a. Kebijakan/tindakan yang akan diambil sebagai implikasi tidak tercapainya kinerja program RENSTRA BKPSDMD.
  1. Penguatan kewenangan lembaga diklat sehingga peningkatan kompetensi ASN lebih maksimal.
  2. Mendorong lahirnya inovasi dan kreatifitas dalam mengatasi minimnya anggaran
- b. Kebijakan/tindakan yang akan diambil sebagai implikasi tercapainya kinerja program RENSTRA BKPSDMD.
  1. Akan dilakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh.
- c. Kebijakan/tindakan yang akan diambil sebagai implikasi realisasi kinerja program RENSTRA BKPSDMD melebihi target.
  1. Melakukan evaluasi kinerja dan penyesuaian target capaian.
  2. Mengembangkan indikator kinerja agar cakupan layanan menjadi lebih luas.

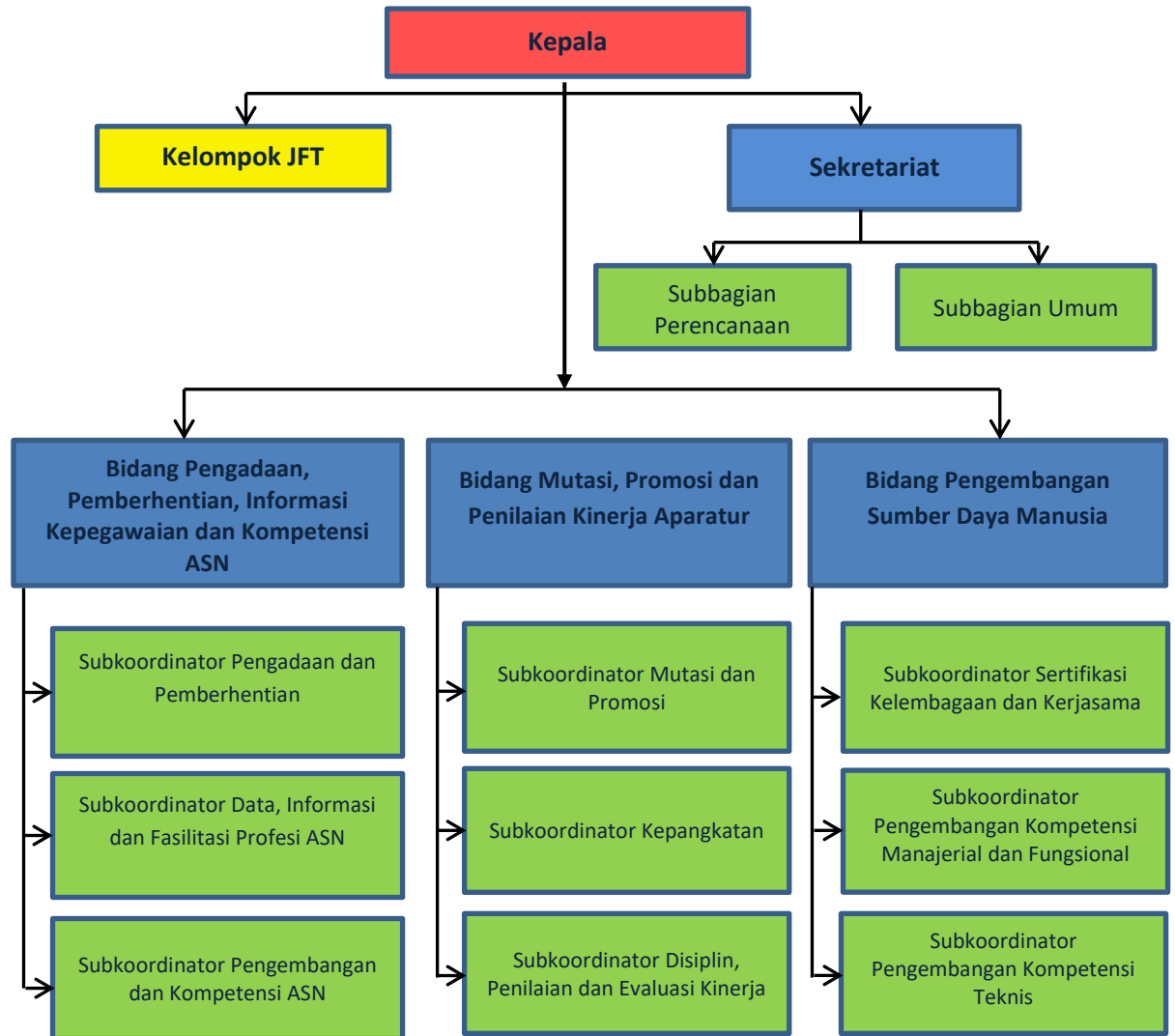
## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Umum.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi dan Profesi ASN, membawahkan:
  1. Subkoordinator Pengadaan dan Pemberhentian;
  2. Subkoordinator Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN;
  3. Subkoordinator Pengembangan Kompetensi ASN.
- d. Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, membawahkan:
  1. Subkoordinator Disiplin, Penilaian dan Evaluasi Kinerja;
  2. Subkoordinator Mutasi dan Promosi;
  3. Subkoordinator Kepangkatan.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
  1. Subkoordinator Sertifikasi Kelembagaan dan Kerjasama;
  2. Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Teknis;
  3. Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Guna mendukung kinerja dan berjalannya tugas serta fungsi dari organisasi di lingkungan BKPSDMD sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur yang dimiliki. Berdasarkan data pertanggal 31 Desember 2022, BKPSDMD didukung pegawai sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang. Dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.

Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin Pertanggal 31 Desember 2022

No.	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JABATAN		
		Laki-Laki	Perempuan	STRUKTURAL	JFU	JFT
1	2	3	4	5	6	7
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	57	41	7	25	66
TOTAL		98		98		

Sumber : Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN

Tabel 2.3.

Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Pertanggal 31 Desember 2022

No.	INSTANSI	TINGKAT PENDIDIKAN										GOLONGAN					
		S-3	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	IX	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2	34	51	0	5	0	0	6	0	0	32	58	8	0	0	0
TOTAL		2	34	51	0	5	0	0	6	0	0	32	58	8	0	0	0
98												98					

Sumber : Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja BKPSDMD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi digunakan alat ukur yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dan sasaran strategis BKPSDMD. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.

#### Indikator Kinerja Utama BKPSDMD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Terhadap Jabatan	Persentase ASN Yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan	52%	61%	70%	80%	89%
			Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN	Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori baik	56%	65%	74%	83%	93%

Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel di atas memiliki definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 2.5.

## Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama BKPSDMD

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Definisi Operasional</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan	Jumlah ASN yang berkompeten / Jumlah ASN Provinsi x 100
2	Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori minimal baik	(Jumlah ASN yang Berkinerja Baik – Jumlah ASN yang Mendapat Hukuman Disiplin) / Jumlah Pegawai ASN Provinsi x 100

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan teknik penghitungan realisasi capaian IKU BKPSDMD yaitu :

1. Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan.  
Capaian ini dapat dihitung melalui pengukuran indeks profesionalitas ASN. Hasil pengukuran tersebut dapat diinventarisir jumlah ASN yang memenuhi kompetensi yang akan dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori baik.  
Capaian ini dapat dihitung melalui capaian kinerja individu Jumlah ASN yang capaian kinerja berkategori minimal baik dikurangi dengan jumlah ASN yang menerima hukuman disiplin kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dilakukan melalui pelaksanaan 3 (tiga) program yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Kepegawaian Daerah; dan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Capaian Indikator Program selama 5 (lima) tahun terkait urusan kepegawaian dan urusan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.

## Capaian Indikator Program (outcome)

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN																					
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Tingkat Kepuasan Aparatur PD terhadap Pelayanan Kesekretariatan	90%		67%																	
	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat BKPSDMD					92%		92,58%		95%		92,69									
	Nilai Sakip PD	59	9.676.024.880	80,79	9.091.039.627		8.689.426.924		8.302.352.965		5.855.505.663		5.535.776.077								
	Nilai LAKIP BKPSDMD					62,00		80,60		65,00		80,88									
	Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi	87%		95,78%		90%		95,00%		91%		91,00%									
	Nilai Indeks Profesional ASN	63		89,98		68		62,74		76		71,27									
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai BKPSDMD yang Terlayani (Orang)	187	4.958.673.394	187	4.715.403.053	201	6.399.447.424	195	6.107.313.267	187	4.630.100.864	180	4.509.376.471								
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor (Paket)	7		6		11		11		0		0									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara (Paket)	10	3.463.605.580	10	3.234.163.099	9	1.794.369.000	10	1.730.772.898	4	1.135.470.399	4	939.910.206								
	Jumlah Mesin Genset Yang Terpelihara (Unit)									1		1									
	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Unit)	46		46		6		6		7		7									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (Dokumen)	5	115.419.660	5	108.811.701	5	34.338.000	10	34.035.600	5	47.494.500	5	44.419.500								
	Jumlah Dokumen (Dokumen)	2		2		2		2		2		2									
Penguatan Kelembagaan / Organisasi	Jumlah Laporan (Laporan)	2	157.855.700	2	142.046.694	1	32.853.000	1	30.649.000	1		0									
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya (Orang)	567	594.370.526	538	556.933.130	1092	423.469.500	1.457	394.641.500												
Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pegawai BKPSDMD yang meningkat disiplinnya (Orang)	187	298.251.000	187	259.869.250																

Usuran/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya (Orang)	-	-			-	-			0		0									
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan (Laporan)	9	87.849.020	7	73.812.700	9	4.950.000		4.940.700	9	42.439.900	9	42.069.900								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	Nilai Sakip PD													85	20.059.814.301	82	19.713.066.263	83			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD (Dokumen)													9	-	9		9		9	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)													2		2		2		2	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD (DALEV, LAKIP, LPPD dan ATA) (Dokumen)													7		7		7		7	
	Survei Kepuasan Pelayanan Internal													95		69,42					
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD Tepat Waktu (Laporan)													3	15.575.732.394	3	15.422.378.860				
	Jumlah kegiatan administrasi umum PD																	5		5	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang Terima Gaji dan Tunjangan (Orang)													97	15.575.732.394	102	15.422.378.860	97	16.883.226.293	100	16.375.025.845
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)													0		0					
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Hasil (Laporan)													0		0					
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD													0		0					
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum PD (Kegiatan)													6	569.279.055		512.667.392	5		5	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia (Komponen)													20	28.757.840	20	28.685.000	35	41.054.032	35	40.999.400

Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor Yang Dibeli (Jenis)													0	-	0	0				
	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang Dibeli (Jenis)													0	-	0	0				
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia (Jenis)													6	44.150.406	6	44.046.738	7	14.962.610	7	14.937.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah Barang Cetak (Barang Cetakan )													20	37.646.283	20	37.624.250	20	36.004.581	20	35.498.800
SubKegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumah Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan (Buku)													0	-	0	0				
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan dan Perlatan Kebersihan Kantor Yang Tersedia (2 Jenis, Bahan dan Alat)													2	187.963.526	2	187.540.100	2	233.817.647	2	232.041.000
	Jumlah Jenis ATK Yang Dibeli													5		5		5		5	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Tamu yang Tersedia (Pax )													80	15.950.000	453	15.882.500	118	20.060.000	287	18.775.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilaksanakan (kali)													24		12		16		35	
	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Yang Dilaksanakan (Kali)													24	254.811.000	69	198.888.804	103	254.869.000	24	253.670.359
	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang Tersedia (Pax )													1150		5.047		1100		2657	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Jenis)													4	3.581.570.000	4	3.518.551.582				
	Survey kepuasan pelayanan internal (BKPSDM)																	98		90	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Barang yang Dikirim (Jenis)													2	3.670.000	2	2.811.500	2	9.979.000	2	7.924.500
	Jumlah Materai (Lembar)													550	5.500.000	550	5.500.000	550		550	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/Fax , TV Kabel , Virtual Meeting Yang Dibayarkan (Bulan)													12	518.700.000	12	459.440.082		491.436.216		447.740.577
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Peneyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)													81	3.053.700.000	81	3.050.800.000				
	Jumlah Tenaga Kontrak Yang Dipekerjakan																	78	2.989.900.000	78	2.987.000.000

Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Survey kepuasan pelayanan internal (BKPSDM)																	98		90	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis BMD yang Dipelihara (Jenis)													3	333.232.852	3	259.468.429				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (Unit)													7	161.056.704	7	98.510.929	7	161.052.151	7	150.858.532
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara (Unit)													3	65.000.000	3	64.577.500	3	1.658.690.818	3	1.652.418.300
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan/Pertengakan Gedung Kantor Yang Dipelihara (Jenis)													2	107.176.148	2	96.380.000	2	132.740.000	2	121.680.000
PROGRAM PENGADAAN PEGAWAI, MUTASI, PROMOSI, DAN KEPANGKATAN	Persentase Pegawai ASN yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi	64%		0,678532		74%		113,53%		83%		101,00%									
	Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi	83%	2.105.411.100	0,940984	1.673.987.159	87%	1.902.015.000	26,66%	1.460.365.105	92%	1.309.837.980	0,00%	1.228.840.860								
	Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat waktu	91%		0,832927		92%		119,60%		93%		93,00%									
Perencanaan dan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN / Sekolah Kedinasan (Orang)	35		37		25		0													
	Jumlah Yang Lulus Seleksi CASN/ASN (Orang)	270	684.440.500	250	571.804.759	150		0													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kepegawaian (Dokumen)	2		2		1		0													
Pengadaan CASN dan Seleksi Penerimaan Calon Praja PDN/Sekolah Kedinasan Lainnya	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan (Orang)					25	304.400.000	27	176.012.380	25	564.125.000	18	515.873.085								
	Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Mutasi (Orang)							0													
	Jumlah Peserta Yang Lulus CASN/ASN (Orang)					150		0		150		0									
Penyusunan Dokumen Manajemen Pola Karir	Jumlah Dokumen (Dokumen)	-	-			0	-			0	-	0									

Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Perencanaan ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan ASN (Dokumen)	-	-			1	58.615.000	5	49.249.700	2	79.274.000	0	72.303.315								
Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun	Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun (Orang)	750	146.829.600	1154	140.216.382	900	500.000	1.303	500.000	900	25.477.200	1.247	25.477.200								
Promosi dan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang di Promosi / Mutasi (Orang)	400	1.274.141.000	619	961.966.018	250	1.538.500.000		1.234.603.025	280	640.961.780	478	615.187.260								
	Jumlah ASN yang Lulus Seleksi Mutasi (Orang)	50		40		0				63		7									
	Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Talent Scouting (Orang)					-				-											
	Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesment (Orang)					300				65		88									
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan, informasi dan peningkatan kapasitas pegawai													96		201,55		98		111,1	
	Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi dan kepengkatan														1.400.057.587		1.346.365.089		93		96,13
	Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin minimal baik													99,79		99,83		99,8		99,88	
	Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi													73%		77%					
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pegawai yang Terpenuhi Sesuai Formasi (Orang)													146		593		176		191	
	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi														647.394.326		611.007.135		1		805.267.339
	Jumlah data dan informasi kepegawaian yang akurat																	1		1	
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Formasi ASN (Dokumen)													1	5.969.548	1	3.480.300	1	19.903.856	1	16.464.161
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah CASN/IPDN yang Lulus Seleksi (Orang) (121 CASN, 25 IPDN)													146	197.709.733	593	194.364.670	139	106.010.686	18	88.400.694

Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang Diterbitkan SK Pensiun, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun (SK)													102	-	0	0	97	14.351.437	122	13.950.695
Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	MTQ KORPRI Tk. Provinsi dan TK. Nasional (Orang)													0		0					
	Persemanyan Bagi Anggota KORPRI Prov. Kep. Bangka Belitung (Orang)													0		0					
	Jumlah Kelembagaan Profesi ASN (LKBH)													1	277.090.579	1	254.611.721				
	Jumlah Pemberian Bantuan Hukum/LKNH KORPRI (Kasus)													5		0					
	Jumlah Peserta Penyegaran Rohani (Orang)													600		0					
	Jumlah Peraturan Gubernur Tentang TTP ASN di Lingkungan Pemrov Kep. Bangka Belitung (Regulasi)													1		0					
	Jumlah Pemberian Bantuan Hukum/LKBH KORPRI																	1		1	
	Jumlah perombaan dalam rangka HUT KORPRI																	1	549.358.193	1	531.817.700
	Jumlah peserta kontingen mengikuti MTQ Tk. Nasional																	20		16	
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Infomasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi yang Dikelola (Aplikasi)													1	113.839.897	1	110.978.864	1	77.178.292	1	77.171.653
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Dikelola Datanya (Orang)													5.386	52.784.569	5.386	47.571.580	1783	78.209.586	2703	77.462.436
<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Jumlah ASN yang di Promosi dan Mutasi (Orang)</b>													<b>200</b>	<b>299.275.863</b>		<b>290.399.565</b>	<b>325</b>	<b>586.058.465</b>		
Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang Ditempatkan Sesuai Kompetensi (Orang)													200	50.937.654		49.703.640	325	152.955.144		
Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang Diterbitkan SK Kenaikan Gaji Berkala (SK)													2000							
	Jumlah PNS yang Diterbitkan SK Kenaikan Pangkat dan SK Kenaikan Jabatan (SK)													1151	27.827.301		25.239.466				
	Jumlah ASN yang Diterbitkan SK Kenaikan Pangkat																	1175	80.920.216		
Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang Dipetakan Kompetensinya (Orang)													200	220.510.908		215.456.459	350	352.183.105		

Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pegawai Tugas Belajar yang Menerima Beasiswa (Orang)													11	377.998.944		373.096.410	11	599.088.310		
Subegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang Di Assessment (Orang)													0		0		1444	175.992.700	1482	174.402.999
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Beasiswa (Orang)													11	377.998.944	11	373.096.410	9	423.095.610	11	421.288.569
Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Jabatan Fungsional yang DibinaJumlah Jabatan Fungsional yang Dibina(Jabfung)													0		0					
	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja dan Disiplin Minimal Baik													99,79%		99,83%					
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Terbina Jumlah ASN yang diukur nilai indeks profesionalitasnya													5.386	75.388.454	5.386	71.861.979	5469	171.456.421	5890	161.143.740
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diukur Nilai Indeks Profesionalitasnya (Orang)													5.386	37.661.292	5.386	37.655.000	5469	49.870.146	5890	46.193.846
Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Satya Lencana Yang Diterbitkan (Satya Lencana)													500	17.290.192	522	13.967.979	500	50.941.292	534	49.480.711
	ASN Berprestai (Orang)																				
Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang Dibina Disiplinnya (Orang)													2000	15.624.195	2.079	15.430.000	3700	38.677.380	4055	38.551.580
Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani (Kasus)													8	4.812.775	10	4.809.000	8	31.967.603	7	26.917.603
PROGRAM PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN	Persentase ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu	56%		80,09%		65%		63,23%		76%		92,71%									
	Persentase Akurasi Data dan informasi Kepegawaian	78%		106,13%		84%		84,00%		90%		90,00%									
	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang	0,17%	1.949.545.050	0,33%	1.715.416.521	0,15%	5.205.277.000	0,11%	4.672.807.607	0,13%	415.855.776	0,07%	395.829.158						0		0
	Persentase ASN Yang Menerima Penghargaan	2,17%		3,17%		2,19%		10,00%		2,21%		0,00%									

Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah ASN yang di moniev SKP-nya (Orang)	3000	317.146.680	2980	254.575.610																
	Jumlah Dokumen (Dokumen)	1		0																	
	Jumlah Aplikasi Kinerja yang dibangun / dikembangkan (Aplikasi)	-				1				0		1									
	Jumlah Rapergub Tunjangan Kinerja yang dirancang (Rapergub)	-									30.249.480		30.249.460								
	Jumlah ASN Yang Memiliki Kinerja (SKP) Baik (Orang)	-								3000		4.958									
Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN Yang mengikuti Workshop (Orang)	120																			
	Jumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti Sakit / Kejiwaan (Orang)	1		1		3						1									
	Jumlah ASN yang diverifikasi/divalidasi (Orang)	2980		3000		3000						3.000									
	Jumlah ASN yang diperiksa Narkoba (Orang)	1500	519.266.920	0	391.659.965	500						0									
	Jumlah ASN Yang Dibina Pemikahan/Perceiraian (Orang)	0		0		-						0									
	Jumlah Regulasi Kepegawaian (Dokumen)	1		4		-						4									
	Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya (Orang)	3000		3309		2000						3.309									
	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani (Kasus)	8		10		7						10									
Pembinaan ASN	Jumlah ASN Yang Dibina Rohaninya (Orang)																				
	Jumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti Sakit/Kejiwaan (Orang)									0		0									
	Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya (Orang)									0	139.261.320	0	125.515.520								
	Jumlah ASN Yang Terbina (Orang)	-				6907	47.396.000	4.633	44.261.000	1500		1.866									
	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani (Kasus)									0		0									

Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian	Jumlah Arsip Kepegawaian (Arsip)	4500		4500																	
	Jumlah ASN Yang Diperbaiki NIP, Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir (Orang)	10		5																	
	Jumlah Data Kepegawaian Yang Diupdate (Data)	8500		8500																	
	Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan DUK (Buku)	280	452.876.650	200	426.959.208	3	263.090.000	3	253.087.700	2	246.344.978	0	240.064.178								
	Jumlah Artikel, Konten, Terjemahan (Artikel/terjemahan/konten)	350		150																	
	Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang dibangun/dikembangkan (Aplikasi)	5		5																	
	Jumlah Profil Pegawai									5469	5.385										
	Jumlah ID Card (Buah)	1250		2700		-				1800	3.000										
	Jumlah Karpeg, Karis/Karsu Yang Diterbitkan (Kartu)	-				-				125	121										
Peningkatan Kesejahteraan, Pemberian Penghargaan dan Pengembangan Profesi ASN	Jumlah ASN yang menerima KGB (Orang)	2000				-															
	Jumlah ASN yang menerima KARIS / KARSU / KARPEG (Orang)	100																			
	Jumlah Kegiatan Bakti Sosial KORPRI (Kegiatan)	0																			
	Jumlah Dokumen Kepengurusan KORPRI dan Koperasi (Dokumen)	0																			
	Jumlah Atlet ASN Yang Mengikuti Kejuaraan KORPRI antar Instansi Pemprov / PORNAS (Orang)	0	660.254.800		642.221.738	3500															
	Jumlah ASN Purnabakti (Orang)	64				0															
	Jumlah ASN yang dibina rohaniahnya (Orang)	800				800															
	Jumlah ASN penerima Satya Lencana (Orang)	100				100															
	Jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran (Orang)	14																			
	Jumlah ASN berprestasi (Orang)	3				5															

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Peningkatan Kesejahteraan ASN	Jumlah ASN Yang Sejahtera (Orang)	-				2776															
	Jumlah ASN Yang Menerima Pembekalan Purnabhakti (Orang)	-					250.980.000		226.690.000	0		93	0								
	Jumlah ASN Yang Berprestasi (Orang)	-								0		0									
	Jumlah ASN Yang Menerima KGB (Orang)	-								0		3.154									
	Jumlah ASN Yang Menerima Satya Lencana (Orang)	-								0		257									
Pengembangan Profesi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran Tingkat Nasional (Orang)					-	4.643.811.000		4.148.768.907	0	-	3	0								
	Jumlah ASN Yang Dikembangkan Profesinya (Orang)	-				4000		4077													
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial	92%	6.346.790.160	1,001887	6.048.950.152	96%	7.486.508.400	48,18%	6.753.034.050	97%	2.502.795.051	97,00%	2.347.983.822					0		0	
	Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Kompetensi Teknis dan Fungsional	23%		0,187987		42%		19,97%		60%		51,37%									
	Nilai Akreditasi Diklat	71		79,34		81		85,88		81		87									
	Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Pendidikan Formalnya	36,90%		0,35		39,90%		25,33%		41,90%		73,08%									
Ujian Dinas dan Seleksi Diklatpim III dan IV	Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas (Orang)					140	78.240.000	194	72.729.400			194									
	Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Diklatpim III dan IV (Orang)					0		0				0									
Pengukuran dan Pemetaan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Uji Sertifikasi (Orang)							0		0	0	0	0								
Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	Jumlah ASN Yang Lulus Pendidikan Kepemimpinan Pengawas (Orang)	80	1.643.939.800	80	1.586.018.850		2.485.288.000		2.169.627.600												
	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar (Orang)	80		80				0													
	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan (Orang)					40		40													
	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar (Orang)					360		343													
	Jumlah ASN Yang Lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Orang)									40	184.188.000	40	178.900.808								

Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat teknis dan fungsional (Orang)	980		869		660		1.077		480		531									
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek Melalui Jalur Kontribusi (Orang)	120	2.442.488.660	145	2.318.086.479		3.137.584.400	0	2.770.406.941		732.184.001		689.300.065								
	Jumlah ASN yang mengikuti magang (Orang)	4		0				0													
Peningkatan Pendidikan Fomal	Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing (Orang)	35	2.068.929.200	39	1.958.782.677	40	1.681.506.000	34	1.646.374.109												
	Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa (Orang)							0		26	1.393.622.550	30	1.301.615.650								
Peningkatan Mutu Kediklatan	Nilai akreditasi diklat (Nilai)					0		0	93.896.000	81		87									
	Jumlah Dokumen (Dokumen)	3	191.432.500	3	186.062.146	2	103.890.000	2		3	192.800.500	3	178.167.299								
<b>PROGRAM PENILAIAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI ASN</b>	<b>Prosentase ASN Yang Mempunyai Profl Kompetensi Sesuai Dengan Standar Penilaian</b>	<b>20,89%</b>	<b>856.571.320</b>	<b>30,68%</b>	<b>520.003.212</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengukuran dan Penilaian Kompetensi Aparatur	Jumlah ASN yang lulus seleksi Talent Scouting (Orang)	50		85		50															
	Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas Tingkat I dan II (Orang)	0		0		50															
	Jumlah ASN yang Mengikuti Assesment (Orang)	600		303		300															
	Jumlah ASN Yang Dipetakan Rekam Jejaknya (Orang)	0		0																	
	Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi PIM III dan IV (Orang)	0		0																	
	Jumlah ASN Yang Mengikuti Roadshow Penilaian Kompetensi ASN (Orang)	0		0																	
	Jumlah ASN Yang Dianalisa Kebutuhan Uji Kompetensinya (Orang)	0		0																	
	Jumlah Laporan Evaluasi Penilaian dan pemetaan Kompetensi ASN (Laporan)	0		0																	

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase ASN yang Meningkat Kompetensinya</b>			0	0			0	0					74	851.633.121	154,62	792.922.687	83	3.103.440.783	84,89	2.957.583.233
<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase ASN yang Meningkat Kompetensi Teknis</b>			0	0			0	0					17,18	288.057.802	15,15	272.239.437	18,47	616.797.479	32,73	600.054.756
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Konkuren, Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis													6	9.174.000	6	6.830.000				
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Usuran Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis (Dokumen)													16	- 0	0	0				
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis (Orang)													350	278.883.802	577	265.409.437	1000	616.797.479	1763	600.054.756
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Usuran Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis (Laporan)													1	- 0	0	0				

Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang meningkat kompetensi manajerial dan fungsional			0	0			0	0					26,06%	563.575.319	23,73	520.683.250	17,37	2.486.643.304	31,15	2.357.528.477
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengelolaan Kelembagaan (Dokumen)													0	-	0	0				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi (Orang)													40		0					
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Dokumen Mutu Pengembangan Kompetensi (Dokumen)													8	106.154.004	8	94.400.100	6	144.779.351	6	143.479.764
	Nilai Akreditasi Diklat													0		0		81,2		86,33	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Laporan Hasil Kerjasama Antar Lembaga													0		0					
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah													0		0					
	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi													0							
	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri Bagi jabatan Fungsional													0							

Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d	
3	4	5		10		6		11		7		12		8		13		9		14	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Prajabatan													124	455.039.315	157	424.415.550	80		359	
	Jumlah Pimpinan Daerah yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi													0		0	0	80	2.325.570.853	0	2.197.903.772
	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi													0		0	0	30		41	
	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan													0		0	0				
	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi													124		0	0				
	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi													1	2.382.000	1	1.867.600				
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan													0		0					
	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional													0		0					
	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis																	10	16.293.100	10	16.144.941

Adapun hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan BKPSDMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDMD  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisa
				2022 (Thn n-2)	2023 (Thn n-1)	2024 (Thn n)	2025 (Thn n+1)	2022 (Thn n-2)	2023 (Thn n-1)	2024 (Thn n)	2025 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase ASN Yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan		Meningkatnya Kompetensi Aparatur	89%	80%	82%	84%	93,36%	80%	82%	84%	Tahun 2022 telah dilaksanakan seleksi CPNS sebanyak .... Orang dengan formasi....., Pendataan Tenaga Non ASN sebanyak 4.402 orang, Asessment terhadap 1.482 orang pegawai untuk menilai kapasitas dan kompetensi pegawai, serta Peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan minimal 20JP.
2	Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori baik		Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN	99,82%	-	-	-	99,88%	-	-	-	Tingkat disiplin pegawai meningkat, hal ini dilihat dari menurunnya jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dari 9 orang pegawai pada tahun 2021 menjadi 7 orang pegawai di tahun 2022
3	Persentase ASN yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur		Meningkatnya standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur	-	95.50%	95.75%	96%	-	95.50%	95.75%	96%	

### 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah perlu dilakukan identifikasi permasalahan sebagai strategi untuk mengetahui isu strategis dalam pelaksanaan tupoksi BKPSDMD, sekaligus meningkatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang dalam mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman.

Reformasi Birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan, tetapi merupakan kebutuhan dalam perbaikan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Reformasi Birokrasi dilaksanakan untuk **mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia pada Tahun 2025**. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, salah satunya dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di suatu instansi pemerintah ditentukan oleh ASN sebagai faktor kunci. Kualitas ASN yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kualitas ASN dapat dilihat melalui kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing ASN. Perlu dilakukan pengelolaan kompetensi pegawai melalui peningkatan kompetensi secara sistematis dan berkesinambungan agar kedepannya kualitas ASN dapat terus terjaga dan meningkat dari sebelumnya.

#### 2.3.1. Sinergi Program Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 mengangkat tema **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Ada 5 (lima) prioritas nasional yang akan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1). Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- 2). Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah;
- 3). Menciptakan Nilai Tambah Baik Sektor Pertanian, Manufaktur dan Sektor Jasa;

- 4). Mengenai Ketahanan Pangan, Energi dan Air;
- 5). Stabilitas Keamanan nasional dan pengamanan Pemilu.

Prioritas pertama nasional yaitu pembangunan sumber daya manusia direncanakan akan berlangsung besar-besaran. Hal ini dilakukan dengan alasan karena negara tidak bisa terus menerus bergantung kepada kekayaan yang dihasilkan dari sumber daya alam, seperti batu bara, minyak dan gas. Kunci untuk pertumbuhan ekonomi ke depan adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan pada tahap ke-III (2017-2022) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 yaitu **Pembangunan Ekonomi dan Terpenuhi Kapasitas dan Kualitas SDM.**

### **2.3.2. Permasalahan dan Hambatan**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masih ditemukan beberapa permasalahan dan hambatan, sebagai berikut:

- 1) Penjaminan mutu kediklatan.

Penggabungan unit kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Sekretariat KORPRI mengakibatkan kewenangan pelaksanaan fungsi dan anggaran pengembangan kompetensi SDM menjadi terbatas.

- 2) Kedisiplinan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal.

Banyak upaya untuk mendisiplinkan PNS tidak diakomodir dan program tunjangan kinerja (Tukin) belum optimal sehingga masih membutuhkan pengembangan.

- 3) Aplikasi kepegawaian belum optimal dan terintegrasi.

Beberapa aplikasi kepegawaian masih belum optimal sehingga administrasi masih banyak menggunakan kertas. Dengan aplikasi kepegawaian yang lebih optimal, diharapkan program *paperless* dapat mendorong pencapaian reformasi birokrasi dan penataan arsip. Saat ini juga aplikasi masih bersifat sektoral belum terintegrasi dengan baik. Banyaknya aplikasi yang harus

ditangani dan diremajakan berdampak pada besarnya sumber daya (manusia, waktu, anggaran) yang harus dikeluarkan setiap tahun.

4) Belum optimalnya perencanaan ASN.

Perencanaan ASN belum optimal karena rencana kebutuhan pegawai lima tahunan belum sesuai dengan rencana strategis organisasi; Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan belum berbasis TI; serta belum adanya metode yang jelas dan terstruktur dalam menentukan rencana distribusi pegawai.

5) Belum optimalnya pemberdayaan KORPRI dan pembekalan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun.

Sejak lembaga pelayanan KORPRI bergabung dengan lembaga pelayanan kediklatan dan kepegawaian dalam 1 (satu) unit kerja BKPSDMD, program/kegiatan pembinaan KORPRI hampir tidak mendapat peluang dari segi penganggaran. Padahal anggota KORPRI adalah seluruh ASN se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa program/kegiatan pembinaan seperti bakti sosial KORPRI, bimbingan teknis bagi anggota yang memasuki masa pensiun, dan lain-lain masih sangat dibutuhkan.

6) Belum optimalnya audit atau assesment, perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi ASN.

### 2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah

Pencapaian visi misi kepala daerah tentunya akan berpengaruh jika permasalahan dan hambatan yang dihadapi BKPSDMD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sedikit banyak, khususnya keberhasilan Misi ke-5 yaitu **meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi**. Apabila permasalahan tidak diatasi dengan baik, capaian Misi ke-5 akan terhambat. Dengan pemanfaatan sistem informasi penghitungan indeks profesionalitas ASN dengan menggunakan aplikasi (bukan manual) mampu memberikan hasil yang lebih meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPSDMD

Beberapa hal yang teridentifikasi sebagai tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDMD yakni sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Tuntutan pelayanan yang lebih baik;
- 2) Keinginan Kepala Daerah untuk menjadi yang terdepan dan rujukan penyelenggaraan kediklatan di wilayah barat Indonesia.

b. Peluang

- 1) *Human Capital Management (HCM)* Aparatur Sipil Negara
- 2) SMART ASN (ASN yang memiliki karakteristik berwawasan global, menguasai teknologi dan informasi serta bahasa, memiliki kemampuan jejaring atau *networking* tinggi dengan kemampuan *skill multitasking* yang proporsional).
- 3) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- 4) Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024.
- 5) Prioritas Pusat dalam pengembangan kompetensi ASN berupa kebijakan pengalokasian anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 0,34% dari total belanja daerah.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BKPSDMD yang akan dituangkan ke dalam usulan program/kegiatan/subkegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan pada Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun proses review ini dilakukan untuk memberi keyakinan

terbatas bahwa analisis kebutuhan BKPSDMD dalam Renja sesuai dengan dokumen Rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat umum. Sasaran program/kegiatan/subkegiatan BKPSDMD adalah Aparatur Sipil Negara. Khususnya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan umumnya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur. Namun pelayanan yang dimiliki BKPSDMD seperti fasilitas ruang pertemuan/aula, ruang belajar/kelas, penginapan/asrama/paviliun diperuntukkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan memiliki anggaran masing-masing. Pemanfaatan fasilitas inilah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui BKPSDMD.

BKPSDMD dalam proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 tidak dilakukan tahapan Forum Perangkat Daerah/rapat koordinasi teknis Perangkat Daerah dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan efektifitas hasil, selain itu juga pertimbangan tidak ada usulan dari masyarakat dan Kabupaten/Kota terkait urusan kepegawaian serta urusan pendidikan dan pelatihan baik dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2024, Forum Trilateral Meeting antara BKPSDMD dengan Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/kota maupun melalui penyampaian pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pokir DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan aspirasi dari masyarakat.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN BKPSDMD



#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 merupakan penjabaran tahun kelima dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. RKP sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan, terutama oleh Pemerintah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Tema **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** menjadi tema yang diangkat pada Rancangan RKP 2024.

RKP 2024 memiliki tujuh arah kebijakan prioritas nasional, yaitu :

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan
3. penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
4. mendorong pemulihan dunia usaha
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. ekonomi hijau
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi

RKP menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP). Namun, dalam draft rancangan RKP 2024 yang telah dipublikasikan secara khusus masih akan melanjutkan prioritas tahun sebelumnya dan belum ada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDMD**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari misi. Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 terkait dengan aparatur yaitu mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi adalah meningkatkan profesionalitas aparatur dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN).

Sasaran dalam RPD Provinsi tersebut sejalan dengan sasaran dalam Renstra BKPSDMD. Ada 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan profesionalitas aparatur yaitu :

1. Meningkatkan standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur;

Salah satu upaya dalam meningkatkan profesionalitas ASN yaitu dengan melihat kesesuaian kualifikasi pendidikan, tingkat kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kualifikasi pendidikan diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); Pendidikan S-2 (Strata-Dua); Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat); Pendidikan D-3 (Diploma-

Tiga); Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / D-1 (Diploma-Satu) / SLTA Sederajat; dan Pendidikan di bawah SLTA. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku kerja. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang telah dicapai, serta tingkat kinerja dan disiplin pegawai maka diharapkan akan meningkatkan profesionalitas aparatur.

## 2. Meningkatnya Kompetensi Aparatur;

Upaya lainnya dalam meningkatkan profesionalitas ASN yaitu meningkatkan kompetensi yang diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi Diklat Kepemimpinan; Diklat Fungsional; Diklat Teknis; dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara. Semakin tinggi tingkat kesesuaian pegawai dengan standar kompetensi yang dimilikinya maka diharapkan dapat meningkatkan indeks profesionalitas ASN dan pada akhirnya akan meningkatkan indeks reformasi birokrasi.

Hubungan antara tujuan sasaran RPD dan tujuan-sasaran BKPSDMD Tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.

Keterkaitan Tujuan Sasaran RPD dan Tujuan Sasaran BKPSDMD beserta Target pada Renja Tahun 2024

RPD		RENSTRA		Indikator Sasaran	Target Sasaran
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi <b>Indikator</b> Indeks Reformasi Birokrasi <b>Target</b> 68,25	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan <b>Indikator</b> Indeks Reformasi Birokrasi <b>Target</b> 68,25	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur <b>Indikator</b> Nilai Indeks Profesionalitas ASN <b>Target</b> 87	1. Meningkatkan standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur	Persentase ASN yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur	95,50%
			2. Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi Sesuai dengan Jabatan	80%

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Meningkatnya standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur serta Meningkatnya Kompetensi Aparatur adalah dua hal yang menjadi sasaran utama dalam meningkatkan profesionalitas aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mencapai kedua sasaran ini perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian diimplementasikan dalam kegiatan dan subkegiatan. Program yang ditetapkan merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk penjabaran dan turunan dari Rencana Strategis yang berisikan program dan kegiatan yang dilaksanakan tiap tahunnya untuk mencapai target dalam indikator kinerja yang dapat memberi kontribusi bagi tercapainya tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dapat diwujudkan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2024 terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) subkegiatan yang tercakup dalam 3 (tiga) program, yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI;
2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH; dan
3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Lokasi penyelenggaraan seluruh program/kegiatan/subkegiatan difokuskan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk mengakomodir kebutuhan operasional pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan usulan pagu indikatif dari BKPSDMD.

Untuk lebih jelas rumusan rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.2.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

## Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH</b>				Rp 31.102.041.873,00			Rp 34.722.100.000
<b>URUSAN PENUNJANG</b>				Rp 31.102.041.873,00			Rp 34.722.100.000
<b>KEPEGAWAIAN</b>				Rp 27.439.087.496,00			Rp 30.847.100.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Pk.Pinang		Rp 24.150.166.868,00	APBD		Rp 25.562.100.000
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pk.Pinang		Rp 500.000.000,00	APBD		Rp 700.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pk.Pinang	2 Dokumen	Rp 350.000.000,00	APBD	2 Dokumen	Rp 450.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 50.000.000,00	APBD	1 Dokumen	Rp 100.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk.Pinang	4 Laporan	Rp 100.000.000,00	APBD	4 Laporan	Rp 150.000.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pk.Pinang		Rp 17.500.000.000,00	APBD		Rp 18.000.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pk.Pinang	97 Orang/ Bulan	Rp 17.500.000.000,00	APBD	97 Orang/ Bulan	Rp 18.000.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pk.Pinang		Rp 680.300.000,00	APBD		Rp 940.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pk.Pinang	30 Paket	Rp 120.000.000,00	APBD	30 Paket	Rp 150.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pk.Pinang	7 Paket	Rp 30.000.000,00	APBD	7 Paket	Rp 50.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pk.Pinang	20 Paket	Rp 64.000.000,00	APBD	20 Paket	Rp 100.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pk.Pinang	3 Dokumen	Rp 12.300.000,00	APBD	3 Dokumen	Rp 20.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pk.Pinang	5 Paket	Rp 190.000.000,00	APBD	5 Paket	Rp 250.000.000
08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Pk.Pinang	12 Laporan	Rp 14.000.000,00	APBD	12 Laporan	Rp 20.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk.Pinang	12 Laporan	Rp 250.000.000,00	APBD	12 Laporan	Rp 350.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pk.Pinang		Rp 3.267.100.000,00	APBD		Rp 3.372.100.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pk.Pinang	12 Laporan	Rp 15.000.000,00	APBD	12 Laporan	Rp 20.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pk.Pinang	12 Laporan	Rp 500.000.000,00	APBD	12 Laporan	Rp 600.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pk.Pinang	12 Laporan	Rp 2.752.100.000,00	APBD	12 Laporan	Rp 2.752.100.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pk.Pinang		Rp 2.202.766.868,00	APBD		Rp 2.550.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pk.Pinang	7 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD	7 Unit	Rp 250.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pk.Pinang	3 Unit	Rp 1.752.766.868,00	APBD	3 Unit	Rp 2.000.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pk.Pinang	121 Unit	Rp 250.000.000,00	APBD	121 Unit	Rp 300.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Pk.Pinang		Rp 3.288.920.628,00	APBD		Rp 5.285.000.000
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Pk.Pinang		Rp 1.298.528.422,00	APBD		Rp 1.800.000.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 50.000.000,00	APBD	1 Dokumen	Rp 100.000.000
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 200.000.000,00	APBD	1 Dokumen	Rp 300.000.000
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 30.000.000,00	APBD	1 Dokumen	Rp 50.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 50.000.000,00	APBD	1 Dokumen	Rp 100.000.000
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Pk.Pinang	1 Lembaga	Rp 793.528.422,00	APBD	1 Lembaga	Rp 1.000.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	APBD	1 Dokumen	Rp 150.000.000
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 75.000.000,00	APBD	1 Dokumen	Rp 100.000.000
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		Pk.Pinang		Rp 755.651.892,00	APBD		Rp 900.000.000
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 250.500.600,00	APBD	1 Dokumen	Rp 300.000.000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pk.Pinang	1 Laporan	Rp 152.990.800,00	APBD	1 Laporan	Rp 200.000.000
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN -	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 352.160.492,00	APBD	1 Dokumen	Rp 400.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		Pk.Pinang		Rp 786.417.568,00	APBD		Rp 950.000.000
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 250.000.000,00	APBD	1 Dokumen	Rp 300.000.000
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 210.000.000,00	APBD	1 Dokumen	Rp 250.000.000
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 263.017.568,00	APBD	1 Dokumen	Rp 300.000.000
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Pk.Pinang	250 Orang	Rp 63.400.000,00	APBD	250 Orang	Rp 100.000.000
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Pk.Pinang		Rp 448.322.746,00	APBD		Rp 600.000.000
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 65.737.346,00	APBD	1 Dokumen	Rp 100.000.000
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Pk.Pinang	3 Orang	Rp 247.805.600,00	APBD	3 Orang	Rp 300.000.000
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Pk.Pinang	620 Orang	Rp 33.832.600,00	APBD	620 Orang	Rp 50.000.000
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pk.Pinang	2500 Orang	Rp 70.000.000,00	APBD	2500 Orang	Rp 100.000.000
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pk.Pinang	7 Laporan	Rp 30.947.200,00	APBD	7 Laporan	Rp 50.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Pk.Pinang		Rp 3.662.954.377,00	APBD		Rp 3.875.000.000
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Pk.Pinang		Rp 984.000.000,00	APBD		Rp 1.035.000.000
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Pk.Pinang	10 Dokumen	Rp 16.569.600,00	APBD	10 Dokumen	Rp 20.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompeten	Pk.Pinang	3000 Orang	Rp 956.157.200,00	APBD	3000 Orang	Rp 1.000.000.000
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Pk.Pinang	10 Dokumen	Rp 11.273.200,00	APBD	10 Dokumen	Rp 15.000.000
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Pk.Pinang		Rp 2.678.954.377,00	APBD		Rp 2.840.000.000
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Pk.Pinang	7 Dokumen	Rp 16.393.000,00	APBD	7 Dokumen	Rp 20.000.000
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Pk.Pinang	90 Orang	Rp 85.295.129,00	APBD	90 Orang	Rp 100.000.000
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Pk.Pinang	3 Laporan	Rp 152.838.718,00	APBD	3 Laporan	Rp 200.000.000
Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Pk.Pinang	1 Dokumen	Rp 16.917.000,00	APBD	1 Dokumen	Rp 20.000.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pk.Pinang	160 Orang	Rp 2.209.101.330,00	APBD	160 Orang	Rp 2.300.000.000
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pk.Pinang	5 Dokumen	Rp 198.409.200,00	APBD	5 Dokumen	Rp 200.000.000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN



#### 4.1. Rencana Kerja

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) yaitu meningkatkan profesionalitas ASN melalui peningkatan standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur serta kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Indikator program/kegiatan/subkegiatan (*outcome/output/suboutput*) yang direncanakan merupakan kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing bidang dan subbidang di lingkungan BKPSDMD yang disusun ke dalam rencana kerja tahun 2024 dan diuraikan menjadi 3 (tiga) program yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai, terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 2 (dua) program teknis dengan 12 (dua belas) kegiatan serta 59 (lima puluh sembilan) subkegiatan dalam Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi; Urusan Kepegawaian Daerah; serta Urusan Pendidikan dan Pelatihan dengan total anggaran sebesar Rp50,633,427,226 (Lima Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih jelas diuraikan sebagai berikut :

#### I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - e. Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
  - f. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### I. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  - a. Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

- b. Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- c. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- d. Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- e. Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- f. Subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
- 2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
  - a. Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
  - b. Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
  - c. Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN
- 3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
  - a. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
  - b. Subkegiatan Pengelolaan Assesment Center
  - c. Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
  - d. Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
  - e. Subkegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
  - f. Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
  - g. Subkegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
  - h. Subkegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
  - i. Subkegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
  - j. Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
  - k. Subkegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional
  - l. Subkegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
  - m. Subkegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
  - n. Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
  - o. Subkegiatan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
- 4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - b. Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

- c. Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
- d. Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN
- e. Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

## II. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
  - a. Subkegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
  - b. Subkegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
  - c. Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
  - d. Subkegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
  - a. Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
  - b. Subkegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional

- c. Subkegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga
- d. Subkegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
- e. Subkegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- f. Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
- g. Subkegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- h. Subkegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional

#### **4.2. Pendanaan**

Penyelenggaraan program/kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan dukungan pendanaan dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

## **BAB V**

### **PENUTUP**



#### **A. Catatan Penting**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan tujuan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah secara efektif dan efisien, disamping itu Renja ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2024.

Sebagai upaya penanganan isu strategis pembangunan tahun 2024 maka BKPSDMD memiliki program prioritas sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah; dan
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Kedua program prioritas tersebut memiliki beberapa indikator dan target yang telah disepakati dan ditetapkan harus dilaksanakan sehingga dibutuhkan dukungan dari sisi penganggaran agar prioritas pembangunan daerah dapat tercapai.

#### **B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 dan 2022;
2. Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 dan 2022;
3. Memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
4. Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan harus dicapai;

5. Memperhatikan keberlanjutan program yang terdapat pada Renstra BKPSDMD selama lima tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

### C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengantisipasi target yang tidak tercapai atau bahkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi tersebut terdiri dari pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana kerja. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja dilaksanakan secara periodik setiap triwulanan terkait program/kegiatan, kinerja dan anggaran, permasalahan dan faktor pendorong dan penghambat serta rencana tindak lanjut yang diperlukan.

Pangkalpinang, April 2023

KEPALA BADAN  
KEPEGAWATAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTI M.AP  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650713 199203 2 002

# Lampiran

## Evaluasi Hasil Terhadap Hasil Rencana Kerja - SKPD Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Pelaksanaan: Triwulan IV 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Restra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Restra SKPD s.d Restra SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Restra SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Restra SKPD yang di Evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.				
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15 = 14/5x100%		16	17												
1	2			3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15 = 14/5x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1																														
	5	03	01			29.058.933.272		19.741.751.263		22.927.792.348		4.237.316.599		5.695.784.151		5.372.125.346		7.033.343.217		22.338.569.313		97,43								
					Nilai Sakip PD	86	125.000.000	81,75	0	85	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0	83,00		81,75	0	95,06	0,00	BKPSD MD			
	5	03	01	1.01	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	125.000.000	10	0	9	4	0	1	0	1	0	3	0	9,00	0	100,00	0	19,00	0	190,00	0,00	BKPSD MD		
	5	03	01	1.01	07	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	65.000.000	2	0	2	1	0	0	0	0	1	0	2,00	0	100,00	0,00	4,00	0	200,00	0,00	BKPSD MD			
	5	03	01	1.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	60.000.000	7	0	7	3	0	1	0	1	0	2	0	7,00	0	100,00	0,00	14,00	0	200,00	0,00	BKPSD MD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00	0,00		200,00	9,00					
Predikat Kinerja																					ST	SR		ST	SR					
	5	03	01	1.02	01	Survei Kepuasan Pelayanan Internal	98	28.933.933.272	69,42	19.713.066.263	95	22.927.792.348		4.237.316.599		5.695.784.151		5.372.125.346		7.033.343.217		22.338.569.313	90,00	97,43	69,42	42.051.635.576	70,84	145,34	BKPSD MD	
	5	03	01	1.02	01	Kegiatan Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (Laporan)	3	20.289.360.985	3	15.422.378.860	3	16.883.226.293	1	3.652.808.009	1	4.504.003.390	1	4.109.353.842		4.108.860.604	3,00	16.375.025.845	100,00	96,99	6,00	31.797.404.705	200,00	156,72	BKPSD MD	
	5	03	01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	97	20.289.360.985	101,75	15.422.378.860	97	16.883.226.293	101	3.652.808.009	100	4.504.003.390	101	4.109.353.842	97	4.108.860.604	97,00	16.375.025.845	100,00	96,99	198,75	31.797.404.705	204,90	156,72	BKPSD MD	
Predikat Kinerja																					100,00	96,99		204,90	156,72					
5	03	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum PD (Kegiatan)	8	2.384.847.287	20	28.685.000	5	600.767.870	2	20.503.000	5	114.537.862	5	179.317.373	5	281.563.324	5,00	595.921.559	100,00	99,19	25,00	624.606.559	312,50	26,19	BKPSD MD	
5	03	1	1.06	1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia (Komponen)	35	200.000.000	20	28.685.000	35	41.054.032			20	2.984.000	25	1.343.000	20	36.672.400	35,00	40.999.400	100,00	99,87	55,00	69.684.400	157,14	34,84	BKPSD MD	
5	03	01	1.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Bahan Logistik)	7	14.962.610	6	44.046.738	7	14.962.610					7	14.937.000	7,00	14.937.000	100,00	99,83	13,00	58.983.738	185,71	394,21	BKPSD MD			
5	03	01	1.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak (Barang Cetak )	Jumlah Barang Cetak (Barang Cetak )	20	100.000.000	20	37.624.250	20	36.004.581			12	11.537.700	15	11.149.900	4	12.811.200	20,00	35.498.800	100,00	98,60	40,00	73.123.050	200,00	73,12	BKPSD MD	
5	03	01	1.06	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan dan Perlitan Kebersihan Kantor Yang Tersedia (2 Jenis, Bahan dan Alat)	2	360.000.000	2	187.540.100	2	233.817.647	2	19.163.000	2	55.482.000	2	54.259.000	2	103.137.000	2,00	232.041.000	100,00	99,24	4,00	419.581.100	200,00	116,55	BKPSD MD	
						Jumlah Jenis ATK Yang Dibeli (5 Jenis)	5	140.000.000	5		5		5	5	5	5	5	5	5,00		100,00		10,00	0	200,00	0,00	BKPSD MD			
5	03	01	1.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Tamu yang Tersedia (Pak)	100	180.000.000	453	15.882.500	80	20.060.000	117	3.355.000	72	5.920.000	98	9.500.000	287,00	18.775.000	358,75	93,59	740,00	34.657.500	740,00	19,25	BKPSD MD			
						Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilaksanakan (Kali)	36	800.000.000	12		36			8	6	10			24,00		66,67		36,00	452.559.163	100,00	56,57	BKPSD MD			
5	03	01	1.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Yang Dilaksanakan (Kali)	36	400.000.000	69	198.888.804	36	254.869.000	3	1.340.000	12	41.179.162	8	106.645.473	12	104.505.724	35,00	253.670.359	97,22	99,53	104,00	0	288,89	0,00	BKPSD MD	
						Jumlah Makan dan Minum Rapat yang Tersedia (Pak)	1500	189.884.677	5047		1150			430		1432				2.657,00		231,04		7.704,00	0	513,60	0,00	BKPSD MD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					144,21	98,44		287,26	77,17					
Predikat Kinerja																					ST	ST		ST	T					

5	03	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey kepuasan pelayanan internal (BKPSDM)	4	3.829.600.000	0	0	98	3.491.315.216	4	554.482.272	4	1.033.000.899	4	999.156.131		856.025.775	90,00	3.442.665.077	91,84	98,61	90,00	3.442.665.077	2.250,00	89,90	BKPSD MD		
	5	03	01	1.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Barang yang Dikirim (Jenis)	2	9.500.000	2	2.811.500	2	4.479.000	1	401.500	1	526.000	2	668.000	2	829.000	6,00	2.424.500	300,00	54,13	8,00	5.236.000	400,00	55,12	BKPSD MD	
							Jumlah Materi (Lembar)	3000	18.000.000	550	5.500.000	550	5.500.000	50	500.000	150	1.500.000	200	2.000.000	150	1.500.000	550,00	5.500.000	100,00	100,00	1.100,00	11.000.000	36,67	61,11	BKPSD MD	
	5	03	01	1.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/Fax, TV Kabel, Virtual Meeting Yang Dibayarkan (Bulan)	12	748.400.000	12	459.440.082	12	491.436.216	3	83.780.772	3	94.274.899	3	129.388.131	3	140.296.775	12,00	447.740.577	100,00	91,11	24,00	907.180.659	200,00	121,22	BKPSD MD	
	5	03	01	1.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)	81	3.053.700.000	81	3.050.800.000	81	2.989.900.000	81	469.800.000	78	936.700.000	78	867.100.000	77	713.400.000	78,00	2.987.000.000	96,30	99,90	159,00	6.037.800.000	196,30	197,72	BKPSD MD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					149,07	86,29				208,24	108,79				
Predikat Kinerja																					ST	T				ST	ST				
5	02	02	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey kepuasan pelayanan internal (BKPSDM)	3	2.430.125.000	7	98.510.929	98	1.952.482.969	1	9.523.318	2	44.242.000	3	84.298.000	0	1.786.893.514	90,00	1.924.956.832	91,84	98,59	97,00	2.023.467.761	3.233,33	83,27	BKPSD MD		
	5	03	02	1.09	02	Sub Kegiatan Pemeliharaan, Biaya dan Perincian Kendaran Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (Unit)	7	210.125.000	7	98.510.929	7	161.052.151	7	9.523.318	2	22.037.000	2	29.712.000	6	89.586.214	7,00	150.858.532	100,00	93,67	14,00	249.369.461	200,00	118,68	BKPSD MD	
	5	02	01	1.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara (Unit)	3	980.000.000	3	64.577.500	3	1.658.690.818	0		0		3	39.461.000	7	1.612.957.300	3,00	1.652.418.300	100,00	99,6218392	6,00	1.716.995.800	200,00	175,20	BKPSD MD	
	5	03	01	1.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan/Pertengkapan n Gedung Kantor Yang Dipelihara (Jenis)	2	1.240.000.000	2	96.380.000	2	132.740.000	0		1	22.205.000	1	15.125.000	2	84.350.000	2,00	121.680.000	100,00	91,67	4,00	218.060.000	200,00	17,59	BKPSD MD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00	94,99				200,00	103,82				
Predikat Kinerja																					ST	ST				ST	ST				
2					KEPEGAWAIAN DAERAH																										
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			6.077.604.202		1.346.365.089		2.201.615.246		119.807.664		500.107.970		188.278.757		1.119.241.669		1.931.249.860									
	5	03	02			Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan, informasi dan peningkatan kapasitas pegawai	73%	5.065.402.713	0,77	1.274.503.110	98%	2.030.158.825		104.724.399		469.324.900		165.732.557		1.030.324.264	111%	1.770.106.120	113,37	87,19	1,88	3.044.609.230	257,67	60,11	BKPSD MD		
	5	03	02	1.01		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pegawai yang Terpenuhi Sesuai Formasi (Orang)	139	3.083.492.216	113	611007135	176	845.012.050	0	9.328.870	0	67.732.800	0	127.297.657		600.908.012	191,00	805.267.339	108,52	95,30	304,00	1.416.274.474	218,71	45,93	BKPSD MD	
	5	03	02	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Formasi ASN (Dokumen)	1	187.699.851	1	3.480.300	1	19.903.856			1	10.314.161		6.150.000	1,00	16.464.161	100,00	82,72	2,00	19.944.461	200,00	10,63	BKPSD MD			
	5	03	02	1.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN/IPDN yang Lulus Seleksi (Orang) (121 CASN, 25 IPDN)	139	668.232.786	113	194.364.670	139	106.010.686		9.328.870		15.846.925		14.547.500	18	48.677.399	18,00	88.400.694	12,95	83,39	131,00	282.765.364	94,24	42,32	BKPSD MD	
	5	03	02	1.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang Diberikan SK Pensiun, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun (SK)	97	187.699.851	0	0	97	14.351.437	24		54	1.762.000	18	4.628.695	33	7.560.000	129,00	13.950.695	132,99		129,00	13.950.695	132,99	7,43	BKPSD MD	

5	03	02	1.02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang di Promosi dan Mutasi (Orang)	325	1.501.465.573	1129	290399565	325	586.058.465	104	69.290.292	71	101.974.421	20	18.249.900	130	179.632.600	325,00	369.147.213	100,00	62,99	1.454,00	659.546.778	447,38	43,93	BKPSD MD
5	03	01	1.02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang Ditempaikan Sesuai Kompetensi (Orang)	200	988.765.722	1129	49.703.640	325	152.955.144	104	4.328.145	71	23.613.447	20	6.755.900	130	104.127.735	325,00	138.825.227	100,00	90,76	1.454,00	188.528.867	727,00	19,07	BKPSD MD
5	03	01	1.02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang Diberikan SK Kenaikan Pangkat dan SK Kenaikan Jabatan (SK)	1175	187.699.851	1191	25.239.466	1175	80.920.216	158	1.581.130	576	8.561.175	333	9.156.000	108	55.865.162	1.175,00	75.163.467	100,00	92,89	2.366,00	100.402.933	201,36	53	BKPSD MD
5	03	02	1.02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang Dipetakan Kompetensinya (Orang)	350	325.000.000	361	215.456.459	350	352.183.105	70	63.381.017	36	69.799.799	0	2.338.000	192	19.639.703	298,00	155.158.519	85,14	44.0562074	659,00	370.614.978	188,29	114,04	BKPSD MD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						95,05	75,90			372,22	62,20	BKPSD MD	
Predikat Kinerja																						ST	S			ST	R	BKPSD MD	
5	03	02	1.03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pegawai Tugas Belajar yang Menerima Beasiswa (Orang)	1444	480.444.924	11	373.096.410	11	599.088.310	0	26.105.237	9	299.617.679	0	20.185.000	2	249.783.652	11,00	595.691.568	100,00	99,43	22,00	968.787.978	1,52	201,64	BKPSD MD
5	03	02	1.03	02	Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang Di Assessment Center	0	128.035.000	0	0	1444	175.992.700	98	21.027.337	75	7.212.344	0	20.185.000	1309	125.978.318	1.482,00	174.402.999	102,63	99,10	1.482,00	174.402.999	136,22		BKPSD MD
5	03	02	1.03	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Beasiswa (Orang)	11	352.409.924	11	373.096.410	9	423.095.610		5.077.900	9	292.405.335	0	-	2	123.805.334	11,00	421.288.569	122,22	99,57	22,00	794.384.979	200,00	225,42	BKPSD MD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						112,43	99,33			100,76	187,76	BKPSD MD	
Predikat Kinerja																						ST	ST			ST	ST	BKPSD MD	
						Persentase ASN yang Memiliki Kinerja dan Evaluasi Minimal Baik	99,82%	1.012.201.489	0	71861979	99,82%	171.456.421	0	15.083.265	0	30.783.070	0	22.546.200	0	88.917.405	99,88%	157.329.940	100,06	91,76	1,00	229.191.919	100,06	22,64	BKPSD MD
5	03	02	1.04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang diukur nilai indeks profesionalitasnya	4215	1.012.201.489	5469	71861979	5469	171.456.421	-	15.083.265	0	30.783.070	0	22.546.200	5469	88.917.405	5.890,00	157.329.940	107,70	91,76	11.359,00	229.191.919	269,49	22,64	BKPSD MD
5	03	02	1.04	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Berprestasi	7	312.833.085	0	0	7		49.870.146	1.033.070		15.000.000		3.910.000		26.250.776	0,00		0,00		0,00	46.193.846	0,00	14,77	BKPSD MD
						Jumlah ASN yang Diukur Nilai Indeks Profesionalitasnya (Orang)	5469	287.806.438	5469	37.655.000	5469							5469		26.250.776	5.469,00		100,00	92,63	10.938,00	37.655.000	200,00	13,08	BKPSD MD
5	03	02	1.04	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Satya Lencana Yang Diberikan (Satya Lencana)	500	125.133.234	522	13.967.979	500	50.941.292		9.022.511		623.070		-	534	39.835.130	534,00	49.480.711	106,80	97,13	1.056,00	63.448.690	211,20	50,70	BKPSD MD
5	03	02	1.04	07	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang Dibina Disiplinnya (Orang)	3700	198.835.468	2079	15.430.000	3700	38.677.380	980	3.695.380	1092	1.750.000	1038	14.386.200	945	14.906.200	4.055,00	34.737.780	109,59	89,81	6.134,00	50.167.780	165,78	25,23	BKPSD MD
5	03	02	1.04	08	Sub Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Dilangani (Kasus)	8	87.593.264	10	4.809.000	8	31.967.603	1	1.332.304	2	13.410.000	1	4.250.000	1	7.925.299	5,00	26.917.603	62,50	84,20	15,00	31.726.603	187,50	36,22	BKPSD MD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						75,78	90,94			152,90	88,00		
Predikat Kinerja																						S	T			ST	SR		
3					URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																								
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Meningkatkan Kompetensi Teknis	83%	5.389.234.269		792.922.687	83%	3.103.440.783		1.000.000		257.999.631		422.513.595		2.276.070.007	85%	2.957.583.233	102,28	95,30					
5	04	02	1.01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis	18%	2.795.300.000	0	272.239.437	76%	616.797.479	15,39	-	0,72	30.351.166	1,79	58.156.563		511.547.027	17,90	600.054.756	2.355,26	97,29	17,90	872.294.193	9.691,39	31,21	BKPSD MD
5	04	02	1.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis (Orang)	1000	2.795.300.000	577	265.409.437	100	616.797.479	833	0	39	30.351.166	97	58.156.563	850	511.547.027	1.819,00	600.054.756	1.819,00	97,29	2.396,00	865.464.193	239,60	30,96	BKPSD MD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						1.819,00	97,29			239,60	30,96		
Predikat Kinerja																						ST	ST			ST	SR		

5	04	02	1.01	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensi manajerial dan fungsional	17,37%	2.593.934.269	0	520.683.250	17%	2.486.643.304	1.000.000	227.648.465	364.357.032	1.764.522.980	31%	2.357.528.477	179,33	94,81	0,31	2.878.211.727	179,33	110,96	BKPSD MD		
5	04	01	1.01	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Dokumen Mutu Pengembangan Kompetensi (Dokumen)	6	144.779.351	8	94.400.100	6	144.779.351	1.000.000	20.472.000	73.236.432	6	48.771.332	6,00	143.479.764	100,00	99,10	14,00	237.879.864	233,33	164,31	BKPSD MD
					Nilai Akreditasi Dikti	81		0		81							0,00		0,00	0,00	0	0,00			BKPSD MD	
5	04	01	1.01	07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Prajabatan	Jumlah CASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Prajabatan	288		157		190		120	80		159	369,00		188,95		516,00	2.622.319.322	179,17	107,73	BKPSD MD	
					Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		2.434.154.918		424.415.550	0	2.325.570.853	-	207.176.465	291.120.600		1.699.606.707	0,00	2.197.903.772	0,00	94,51	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPSD MD	
					Jumlah Pimpinan Daerah yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				0								0,00		0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPSD MD		
5	04	01	1.01	08	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kejasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis	10	15.000.000	1	1.867.600	10	16.293.100	0	-	0	10	16.144.941	10,00	16.144.941	100,00	99,09	11,00	18.012.541	110,00	120,08	BKPSD MD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		129,65	97,57			#DIV/0!	#DIV/0!			
Predikat Kinerja																		ST	ST			#DIV/0!	#DIV/0!			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																		28.232.848.377								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																		278	96,44			#DIV/0!	#DIV/0!			
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																		ST	ST			#DIV/0!	#DIV/0!			
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Memiliki SDM secara kualitas, sarana dan prasarana memadai, suasana kerja kondusif, Ada koordinasi yang baik dengan SKPD di lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota, serta lembaga lain (BKN, LAN, Kemendagri)																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tidak ada kendala																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : Perencanaan Program dan Kegiatan yang Dapat Mendukung Program Pembangunan Daerah																										

Disusun  
Pangkalpinang, Desember 2022  
KEPALA BKPSDMD  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dra. Susanti, M.AP  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650713 199203 2 002

Dievaluasi  
Pangkalpinang, Desember 2022  
KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

H. Fery Insani  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700620 199903 1 009



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH**

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka-Kelurahan Air Itam kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418

Telp. (0717)439314, 439315, 439500 Fax : (0717) 439316,

Email : [bkd@babelprov.go.id](mailto:bkd@babelprov.go.id) Website : [bkd.babelprov.go.id](http://bkd.babelprov.go.id)